

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh

**Jeverson Leo Odom Naitboho¹,
Tjahya Supriatna², Bayi Priyono³**

¹⁾ Staf Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
jeversonleo11@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

The purpose of this study was to study and analyze the Political Participation of the Community at the Regional General Election of Timor Tengah Selatan Regency, East Nusa Tenggara Province. The research method used in the preparation of this thesis is a descriptive research method, with qualitative findings. Data is obtained through data collection techniques: observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that Community Political Participation in the General Election of the Regional Head of Timor Tengah Selatan Regency is not good. This is seen from the aspect: Voting in general elections still has few problems where elections are carried out in the final voter list, to exercise their right to vote e-KTP which is not the address of residence in the RT/RW at the polling station as well as the dissemination that has not been carried out by all communities because it is carried out at the Hotel. Attending a public meeting was held in a formal discussion to discuss requesting and asking related to the election of the Regional Head of Timor Tengah Selatan Regency in 2018 and taking place at the Office of the National Unity and Political Agency of South Central Timor Regency. Relations with government officials have not been well established because the Central Timor District government officials have not been able to take the time to communicate with the community but for the success team has been formed as a campaign team. Being a member of a political party has not been able to attract the attention of most and participants so that this has not been able to increase political participation.

Keywords: participation, politics, election

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum baik hal ini dilihat dari aspek: Pemberian suara dalam pemilihan umum masih ada sedikit masalah di mana pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap,

untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa e-KTP yang bukan alamat tinggal di RT/RW di tempat pemungutan suara tersebut serta pelaksanaan sosialisasi belum diikuti oleh semua masyarakat karena dilaksanakan di Hotel. Menghadiri rapat umum telah dilakukan masyarakat dalam bentuk diskusi formal guna membahas mengenai keinginan serta usulan yang diinginkan terkait pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 serta bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hubungan dengan pejabat pemerintah belum terjalin dengan baik karena pejabat pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat namun untuk tim sukses sudah terbentuk sebagai tim kampanye pasangan calon masing-masing serta adanya demonstrasi yang disebabkan lambannya penyelesaian proses pembuatan E-KTP. Menjadi anggota partai politik belum dapat menarik perhatian sebagian simpatisan dan partisipan sehingga hal tersebut belum dapat meningkatkan partisipasi politik.

Kata kunci: partisipasi, politik, pemilihan

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi yang serentak dijadwalkan pada pekan terakhir Juni 2018 diikuti oleh 171 daerah di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 10 kabupaten di NTT. Hari di mana seluruh rakyat menentukan pilihan untuk membawa dirinya pada kesejahteraan, keadilan dan keharmonisan. Oleh karena itu, penting bagi kita saat ini untuk tidak hanya membicarakan keunggulan atau kelemahan semua putra terbaik NTT yang akan tampil pada pemilihan tahun 2018, tetapi juga mengetahui persoalan-persoalan pelik di daerah kita masing-masing.

Suara sebagai hak pilih dilahirkan dari sikap kritis, rahasia dan rasional menunjukkan martabat rakyat yang adalah hak paten demokrasi. Pemberian hak suara melalui pencoblosan menunjukkan tingginya martabat rakyat dengan terus mencari tahu dan mengkritisi beragam persoalan yang sedang melilit wilayah ini, tidak mudah terprovokasi dan tahan rayuan politik uang yang mengikis daya kritis dan merendahkan martabat manusia.

Partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018

No Kabupaten/Kota	Jml TPS	Jumlah Pemilih Tetap	Partisipasi Politik Masyarakat	%
1 NUSA TENGGARA TIMUR/ALOR	500	132.660	101.868	76.78
2 NUSA TENGGARA TIMUR/ENDE	675	161.604	125.243	77,50
3 NUSA TENGGARA TIMUR/KUPANG	581	205.107	168.638	82.22
4 TIMUR/MANGGARAI TIMUR	510	185.511	143.325	77,26
5 NUSA TENGGARA TIMUR/NAGEKEO	270	92.670	76.916	83.00
6 NUSA TENGGARA TIMUR/ROTE NDAO	260	85.227	64.483	75.66
7 NUSA TENGGARA TIMUR/SIKKA	555	187.672	146.778	78.21
8 NUSA TENGGARA TIMUR/SUMBA BARAT DAYA	561	213.725	173.801	81.32
9 NUSA TENGGARA TIMUR/SUMBA TENGAH	200	47.310	37.961	80.24
10 NUSA TENGGARA TIMUR/TIMOR TENGAH SELATAN	921	274.267	206.169	73,50
TOTAL	5033	1.585.753	1.245.182	78.52

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa daftar pemilih tetap dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara

Timor pada 2018 berjumlah 1.585.753 pemilih, kemudian jumlah partisipasi politik masyarakat mencapai 1.245.182 pemilih atau 78.52%. Dari data tersebut terlihat juga Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki angka partisipasi politik masyarakat yang paling rendah, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 73.50% pemilih sementara angka partisipasi politik masyarakat yang paling tinggi Kabupaten Nagekeo sebesar 83.00%.

Angka partisipasi politik masyarakat Timor Tengah Selatan pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 sebesar 73,59% tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa ada masyarakat yang tidak diikuti partisipasi politik masyarakat masyarakat sebesar 26,41%. Seharusnya partisipasi masyarakat bisa mencapai maksimal karena anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 Kabupaten Timor Tengah Selatan didukung oleh anggaran paling besar kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah provinsi.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan berita dari Pos-Kupang.Com, Soe diakses pada 6 Agustus 2018 dimenangkan Paslon Nomor urut 3: Egusen Piter Tahun/Johni Army Konay: 68.488 suara unggul dari Paslon Nomor urut 1: Ampera Seke Selan, SH/Ir. Yan Tanaem: 32.873 suara, Paslon Nomor urut 2: Obed Naitboho/Aleksander Kase: 67.751 suara dan Paslon Nomor urut 4: Johanis Lakapu/Yefta Mella: 37.066 suara. Bila dihubungkan hak pilih masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berjumlah 280.493 orang dengan hasil suara pemilih berjumlah 206.169 suara atau sebesar 73,50% pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kabupaten Timor Tengah Selatan hal ini menunjukkan angka partisipasi masyarakat masih belum maksimal karena masih ada angka partisipasi masyarakat sebesar 26,41% yang tidak memilih.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah penelitian Kualitatif. Menurut Pendapat Kirk dan Miler (dalam Moleong, 2007: 3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sejalan pendapat yang sama Sugiyono (2005: 6) mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif.

Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Nazir (1999: 63), metode deskriptif adalah :

Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Pengertian pendekatan induktif menurut Nazir (1999: 202), adalah “cara berpikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum.”

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini agar peneliti dapat mengetahui secara jelas tentang Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, di mana peneliti berusaha melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu objek yang kemudian dibahas untuk mendapatkan simpulan umum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menurut Nazir (2011: 194) adalah “proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara).” Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan panduan wawancara, dan mengembangkan pertanyaan pada saat wawancara berlangsung. Peneliti mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Jumlah informan yang akan diwawancara berjumlah 12 orang meliputi: Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Anggota Partai Demokrat, Anggota Partai Golkar, Anggota Partai Nasional Demokrat, Anggota Partai Gerindra, dan Masyarakat pemilih yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang,

petani, ibu rumah tangga Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Dokumentasi

Menurut Suharmi (2010: 274) bahwa “metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan data tertulis berupa Daftar Pemilih Tetap dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Panitia Pemilihan Kepala Daerah, langkah-langkah pemilihan kepala daerah, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan jumlah suara yang diperoleh pasangan calon kepala daerah.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2013: 145) menyatakan bahwa “observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.” Dokumentasi dalam penelitian ini akan melihat dokumen hasil berupa foto-foto pada saat pelantikan panitia, sosialisasi, pada saat calon kepala daerah serta wakilnya melakukan kampanye, dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, pada saat penghitungan suara, dan penetapan kepala daerah yang baru.

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

LANDASAN TEORETIS

Dalam konteks penelitian ini konsep yang digunakan untuk mengukur partisipasi politik peneliti menggunakan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Budiarjo

(2002: 108) bahwa unsur-unsur partisipasi politik terdiri dari: Pemberian Suara Dalam Pemilihan Umum, Menghadiri Rapat Umum, Hubungan Dengan Pejabat Pemerintah dan Menjadi Anggota Partai Politik. Kriteria yang **pertama** adalah Pemberian Suara Dalam Pemilihan Umum, Merupakan bentuk partisipasi politik yang paling luas tersebar. Tujuan pemberian suara antara lain untuk memilih secara langsung badan legislative ataupun eksekutif. Pemberian suara pada pemilihan umum meliputi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kriteria ini memiliki dua indikator, yaitu Proses Pemberian Suara dan Mengikuti Sosialisasi.

- a. Proses pemberian suara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi politik.
- b. Sementara itu mengikuti sosialisasi adalah aktivitas yang dilakukan bersama orang lain guna membicarakan mengenai sesuatu hal.

Kriteria yang **kedua** adalah menghadiri rapat umum, merupakan suatu bentuk partisipasi yang dapat terjadi secara formal. Rapat merupakan partisipasi politik yang dituangkan ke dalam bentuk diskusi-diskusi oleh individu-individu dalam keluarga masing-masing, di tempat kerja atau di antara sahabat-sahabat maupun antarmasyarakat secara formal. Kriteria ini memiliki dua indikator, yaitu diskusi formal dan lokasi diskusi.

- a. Diskusi formal adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu individu dengan menggunakan vasilitas guna membahas suatu permasalahan.
- b. Sementara itu lokasi merupakan suatu tempat diadakannya sebuah kegiatan sebagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Kriteria yang **ketiga** adalah hubungan dengan pejabat pemerintah, Dengan

melakukan hubungan dengan pejabat pemerintah mengenai komunikasi individual dengan pejabat pemerintah sebagai rambu-rambu partisipasi politik. Kegiatan yang diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan kebijakan politik, kegiatan memengaruhi pemerintah yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan melalui prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan. Kriteria ini mempunyai tiga indikator, yaitu Komunikasi, Tim Sukses dan Demonstrasi.

- a. Komunikasi adalah suatu interaksi social yang terjadi antara individu dengan individu serta individu dengan suatu kelompok tertentu.
- b. Tim Sukses adalah partisipasi yang dilakukan seseorang dalam menyukseskan kegiatan pemilu.
- c. Demonstrasi adalah suatu kegiatan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok guna menyampaikan aspirasinya serta hak-hak yang belum terpenuhi.

Kriteria yang **keempat** adalah Menjadi Anggota Partai Politik, Merupakan suatu kegiatan yang dapat di nyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik, karena melalui kelompok ini anggota-anggota masyarakat dapat mengeluarkan berbagai gagasan dan mempertanyakan lewat system politik yang bersangkutan. Kriteria ini memiliki dua indikator, yaitu Simpatisan dan Partisan.

- a. Simpatisan adalah seseorang yang merasa tertarik pada pihak lain dikarenakan adanya dorongan-dorongan tertentu.
- b. Partisan adalah perilaku yang muncul karena adanya pemikiran terhadap seseorang dalam hubungannya dengan rangsangan dari luar lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat

yang telah memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, Atau sekelompok orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin negara maupun kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara sukarela. Selain masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih juga dapat berupa keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti rapat umum yang diadakan oleh suatu lembaga pemerintahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

► **Pemberian Suara dalam Pemilihan Umum**

a) Proses pemberian suara masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018

Proses pemberian suara masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 masih ada sedikit masalah di mana Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa e-KTP yang bukan alamat tinggal di RT/RW di TPS tersebut.

b) Mengikuti sosialisasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai pemahaman tata cara Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018

Mengikuti sosialisasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai pemahaman tata cara pemilihan umum kepala daerah 2018 belum diikuti oleh semua masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan karena komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan lebih memilih sosialisasi di hotel.

► **Sumber-Sumber Kebijakan Menghadiri Rapat Umum**

a) Diskusi formal yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan guna membahas mengenai keinginan serta usulan yang diinginkan terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018

Telah dilakukan diskusi formal yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan guna membahas mengenai keinginan serta usulan yang diinginkan terkait pemilihan umum kepala daerah 2018 yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai peran dari pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b) Lokasi diskusi formal/rapat umum yang diikuti oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan

Lokasi diskusi formal/rapat umum yang diikuti oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sangat berpengaruh terhadap jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah 2018.

► **Hubungan dengan Pejabat Pemerintah**

a) Komunikasi masyarakat dengan pejabat pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Komunikasi masyarakat dengan pejabat pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum terjalin dengan baik karena pejabat pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

b) Tim sukses partisipasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk turut serta membentuk sebuah tim yang berusaha menyukseskan para pasangan calon kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tim sukses partisipasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk turut serta membentuk sebuah tim yang berusaha menyukseskan para pasangan calon kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai tim kampanye.

c) Demonstrasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menyampaikan pendapat serta keluhannya kepada pemerintah apabila haknya belum terpenuhi

Telah dilaksanakan demonstrasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menyampaikan pendapat serta keluhannya kepada pemerintah apabila haknya belum terpenuhi disebabkan lambannya penyelesaian proses pembuatan E-KTP.

► **Menjadi Anggota Partai Politik**

a) Simpatian ketertarikan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk turut berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah 2018

Simpatian ketertarikan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk turut berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 belum dapat menarik perhatian sebagai simpatian sehingga hal tersebut belum dapat meningkatkan partisipasi politik untuk turut serta menjadi anggota salah satu partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b) Partisan perilaku masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima rangsangan dari luar lingkungannya pada Pemilihan Kepala Daerah 2018

Partisan perilaku masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima rangsangan dari luar lingkungannya pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 belum dapat menarik perhatian sebagian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kegiatan partisan yang belum berjalan dengan baik serta kurang adanya kesadaran masyarakat untuk dapat terlibat sebagai simpatian sehingga hal tersebut belum dapat meningkatkan partisipasi politik untuk turut serta menjadi anggota salah satu partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

► **Panitia Pemilihan Kepala Desa Kurang Diminati**

a. Susahnya mendapatkan elektronik kartu tanda penduduk

Susahnya mendapatkan elektronik Kartu Tanda Penduduk masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan disebabkan lambannya penyelesaian proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang membuat masyarakat harus menunggu dalam waktu lama agar bisa memiliki kartu identitas sebagai syarat dapat mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018.

b. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Mengikuti sosialisasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai pemahaman tata cara pemilihan umum kepala daerah 2018 belum diikuti oleh semua masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan

karena Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan lebih memilih sosialisasi di Hotel.

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

a. Adanya Komunikasi

Adanya komunikasi yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman (miss communication) yang berdampak buruk pada pelaksanaan kebijakan e-KTP merupakan langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan supaya lambannya pembuatan E-KTP cepat teratasi apalagi ketika akan menjelang pemilihan kepala daerah E-KTP menjadi salah satu yang diperlukan supaya dapat ikut memberikan partisipasi politik.

b. Sosialisasi di Setiap Kecamatan

Sosialisasi di setiap kecamatan menjadi bahan masukan untuk komisi pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setidaknya masyarakat mau datang menghadiri sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pertama, partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum baik hal ini dilihat dari aspek:

a. Pemberian suara dalam pemilihan umum masih ada sedikit masalah di mana pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, untuk menggunakan

hak pilihnya dengan membawa e-KTP yang bukan alamat tinggal di RT/RW di tempat pemungutan suara tersebut serta pelaksanaan sosialisasi belum diikuti oleh semua masyarakat karena dilaksanakan di hotel.

- b. Menghadiri rapat umum telah dilakukan masyarakat dalam bentuk diskusi formal guna membahas mengenai keinginan serta usulan yang diinginkan terkait pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2018 serta bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- c. Hubungan dengan pejabat pemerintah belum terjalin dengan baik karena pejabat pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat namun untuk tim sukses sudah terbentuk sebagai tim kampanye pasangan calon masing-masing serta adanya demonstrasi yang disebabkan lambannya penyelesaian proses pembuatan E-KTP.
- d. Menjadi anggota partai politik belum dapat menarik perhatian sebagian simpatisan dan partisipan sehingga hal tersebut belum dapat meningkatkan partisipasi politik.

Kedua, faktor-faktor penghambat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain: susahnya mendapatkan elektronik kartu tanda penduduk dan kurangnya sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ketiga, langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani faktor-faktor penghambat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui adanya komunikasi dan sosialisasi di setiap kecamatan.

SARAN

Pertama, teoretis. Perlu dikaji secara mendalam mengenai partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah.

Kedua, praktis.

- 1) Untuk meningkatkan pemberian suara/voting yang tergolong cukup rendah maka PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) harus melakukan sosialisasi tentang penggunaan hak pilih secara intensif, melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif dengan menyentuh semua lapisan masyarakat.
- 2) Untuk memaksimalkan diskusi politik, pemerintah daerah, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan politik dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu bekerja sama untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal forum diskusi politik yang sifatnya formal dan menyentuh semua kalangan masyarakat secara kontinu misalnya dengan mendirikan rumah pintar pemilu.
- 3) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye, partai politik yang mengusung pasangan calonnya perlu melakukan kampanye kepada masyarakat, kampanye yang dimaksud di sini kampanye yang tidak hanya dimotivasi oleh kepentingan politik akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
- 4) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal bergabung dalam kelompok kepentingan, partai politik sebagai mesin politik harus mampu memperbaiki proses rekrutmen politik guna mencari orang yang berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik. Selain itu, melaksanakan pendidikan politik rakyat baik secara dialog dan

pengajaran instruktif kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan secara intensif, sehingga tujuan dari pendidikan politik dapat tercapai, yaitu membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik masyarakat untuk bergabung dalam kelompok kepentingan (tim sukses).

DAFTAR PUSTAKA

Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiarjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Cakra Abbas, 2012. *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. Medan: PT Softmedia.

Cholisin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.

Deden Fatiurohman dan Wawan Sobari, 2004. *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: UMM.

Firmanzah. 2007. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: ayasan Obor Indonesia.

Gaffar Affan. 2014. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Huntington Samuel. 2012. *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Jakarta: Qalam.

Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kristiadi. 1996, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Jakarta: LAN.

Maran, Rafael Raga, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta

Mas'oed, Mohtar. McAndrews, Colin (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nursal Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Nazir, Muhammad 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nelson, Samuel P. Huntington dan Joan, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prihatmoko, Joko J. 2005, *Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Rush, Althoff, Michael 1989, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Rajawali.

Sanit, Arbi 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali.

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Soemarsono. (2002). *Komunikasi Politik*. Bandung: Universitas Terbuka.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zuhro, R. Siti dkk. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta: Ombak.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang No. 10 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Sumber Lain

<http://fakta-tts.com> diakses pada 6 Agustus 2018

<http://kupang.tribunnews.com> diakses pada 6 Agustus 2018

pos-kupang.com, soe diakses pada 6 Agustus 2018